Hantu Anarko dan Politik Penyangkalan

Published September 24, 2025 Uncategorized Leave a Comment

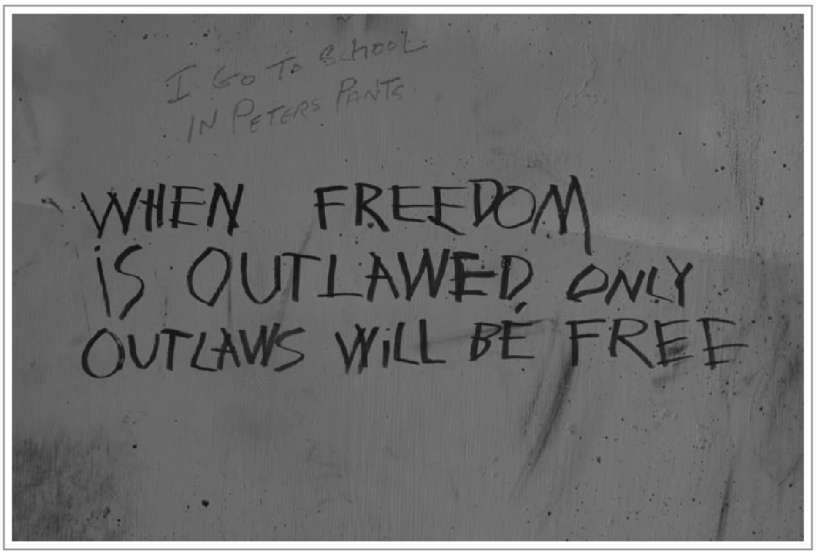

> *To be great, be whole: exclude*
> *nothing, exaggerate nothing that is you*
> *Be whole in everything / Put all you are*
> *into the smallest thing you do*
> *The whole moon gleams in every pool*
> *it ride so high*
>
> *— Fernando Pessoa/Ricardo Reis, Selected Poems (hal. 49)*

Berita tentang penangkapan "kelompok anarko" beredar di media sosial. Sebanyak 42 orang berubah menjadi angka, menjadi bukti di hadapan kamera, dituduh "perusuh" dan "anarkis". Gelombang penangkapan menyebar hingga ke kota-kota lain, dari Bandung, Jakarta, hingga laporan penangkapan yang ditengarai hingga ke Ciamis, Jombang, dan Makassar. Bagiku ini bukan sekadar statistik, tapi upaya Negara dan aparatusnya menandai sebuah narasi politik agar mudah dicerna publik: ada "aksi-aksi pembakaran/perusakan", maka ada "pelakunya", lalu pewajaran tindakan represif mengikuti di belakangnya.

Polda Jawa Barat menyebut penetapan puluhan tersangka tersebut terkait kericuhan di Bandung. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat mencatat gelombang penangkapan yang lebih besar dari hanya angka yang diklaim aparat. Ada catatan bahwa ratusan orang sempat ditangkap dalam rentang hari kericuhan (termasuk anak-anak di bawah umur) dan polisi juga melaporkan penyitaan materi-materi yang mereka labeli sebagai "referensi anarkis", termasuk puluhan buku dan poster-poster (yang lucunya, menampilkan wajah Fernando Pessoa dan Man Ray) sebagai benda-benda "subversif." Itu semua nyata, bukan retorika teoretis, dan mereka menjadikannya barang bukti di persidangan narasi seolah-

olah ada paham yang harus diberangus dan ada ‘aktor/dalang’ yang harus dipisahkan dari publik.

Kejengkelanku berasal dari dua kata lucu: “kelompok anarko.” *Pertama*, bagiku itu adalah sebuah oksimoron. Siapapun yang mengenal anarkisme dengan sungguh-sungguh, pasti paham maksudku. “Kelompok”—sebagaimana lazimnya dipahami dalam logika Negara—menuntut struktur, kepemimpinan, dan hierarki. Sedangkan anarkisme, sejauh kupahami, adalah apapun yang sebaliknya. Sel/jejaring, atau afinitas, mungkin. Kelompok? Menyebut “kelompok anarko” sama konyolnya dengan menyebut “pemerintah tanpa kekuasaan” atau “militer pasifis.” *Kedua*, penggunaan label “anarko” sebagai upaya sistematis Negara dari tahun ke tahun untuk menciptakan musuh imajiner. Dulu ada “komunis” sebagai stigma *readymade*, kini “anarko” dipoles untuk fungsi serupa.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, label “anarkis/anarko” bekerja seperti kata kunci magis yang mereduksi, di mana mereka (aparatus Negara dan publik non-prekariat, alias kelas menengah) tidak merasa perlu membedah muatan atau gagasan dalam aksi-aksi politik yang beredar di setiap letupan protes yang terjadi, apalagi kondisi materil yang melandasi aksi-aksi kerusuhan yang terjadi belakangan. Yang mereka perlu lakukan cukup menempelkan kata tersebut untuk memindahkan perdebatan dari “apa akar permasalahannya” ke “siapa aktor/dalang” nya. Polisi, pejabat publik, hingga sederet *influencer*, sering memakai kata-kata seperti “anarkis”, “perusuh”, atau “intel/penghasut” ketika ingin meredam simpati publik sekaligus memberi justifikasi legal dan simbolik bagi Negara untuk melakukan berbagai macam tindak kekerasan sipil seperti penangkapan atau bahkan penghilangan paksa. Di beberapa kasus serupa sebelumnya, aparat juga sama cepatnya memakai label ini untuk merasionalisasi penangkapan massal.

Pola pelabelan (yang melekat menjadi stigma) ini memang bukan hal baru. Dalam sejarah, gerakan anarkisme memang hampir selalu dijadikan kambing hitam dalam perjuangan kebebasan, dan itu memang adanya. Tengok kasus Sacco dan Vanzetti di Amerika Serikat awal abad ke-20. Keduanya merupakan imigran asal Italia. Sacco dan Vanzetti dieksekusi dengan kursi listrik, bukan semata-mata karena tuduhan perampokan atau aksi-aksi ilegal yang mereka lakukan sebelumnya (yang menurutku lebih dilandasi oleh kondisi struktural ketimbang ideologis), tapi hanya karena mereka adalah seorang anarkis (atau lebih tepatnya, Galleanis) yang menjadi salah satu pemicu propaganda *Red Scare* di Amerika Serikat awal abad ke-20. Bukti-bukti hukum yang disediakan rapuh, tetapi stigma sudah terlanjur mengunci opini publik yang mengecam mereka sebagai pembuat onar atau pengganggu stabilitas Negara.

Para pelaut Kronstadt dengan slogan di bendera: "Kematian untuk para borjuis!"

Di waktu yang nyaris bersamaan, dan di belahan benua lain, Pemberontakan Kronstadt terjadi. Para pelaut, infanteri, dan rakyat sipil yang sebelumnya menjadi tulang punggung revolusi Rusia, menuntut kebebasan dari Soviet dan dihapusnya birokrasi di bawah kepemimpinan Bolshevik (yang mengesahkan kekuasaannya lewat komite-komite kecil sebagai pengambil keputusan sepihak). Mereka para pelaut Konstradt segera dilabeli "kontra-revolusioner" oleh rezim Bolshevik (baca: Lenin dan Trotsky), dan ditumpas habis. Di masa perang sipil Spanyol, kaum anarkis (lewat serikat buruh CNT dan afinitas FAI) di bawah kediktatoran Franco dilabeli "kriminal," "perusak bangsa," "musuh agama," padahal mereka telah berhasil menciptakan sistem kolektifisasi buruh dan tani yang unik dalam sejarah. Pabrik-pabrik besar—transportasi, percetakan, tekstil, bahkan bioskop—dijalankan secara kolektif oleh para pekerjanya sendiri, tanpa bos. Di pedesaan, tanah didistribusikan ulang secara merata, mengeliminir sistem monopoli feodal dan permainan cukong-cukong tanah (yang bersekongkol dengan gereja Katolik). Lebih jauh lagi, banyak komunitas memilih untuk menghapus uang sama sekali, menggantinya dengan sistem distribusi langsung, atau kupon kolektif. Perang sipil Spanyol adalah eksperimen sosial paling berani dalam sejarah modern setelah Komune Paris, sebuah upaya (imajinatif) untuk mewujudkan dunia tanpa Negara dan tanpa kapitalisme, bukan di atas kertas, bukan dalam manifesto, melainkan dalam penerapan teorinya di kehidupan sehari-hari (yang terwariskan hingga saat ini, dari Otonomia di Italia sampai Exarcheia di Yunani). Tapi lagi-lagi, di bawah cengkeraman Negara yang fasistik, label "anarkis" dipelintir untuk melegalkan eksekusi massal dan pengasingan.

Anarkis Katalunya, di masa perang sipil Spanyol (1936)

Di Chicago, insiden Haymarket (atau yang lebih dikenal "Haymarket Affair") meledak. Kaum pekerja menuntut sesuatu yang kini kita anggap lumrah (*taken for granted*): hak untuk mendapatkan delapan jam kerja dalam sehari. Demonstrasi besar-besaran terjadi, dan di tanggal 4 Mei, sebuah bom dilempar ke arah polisi, menewaskan beberapa polisi dan pekerja. Negara segera merespons dengan mengkambinghitamkan para anarkis yang memimpin protes, meski tidak ada bukti jelas bahwa mereka pelakunya. Stigma "anarkis" sudah telanjur dipaku ke jidat mereka, menjadi dalih bagi Negara untuk menjustifikasi eksekusi. Delapan aktivis ditangkap, diadili dalam sebuah persidangan penuh bias, dan empat di antaranya digantung. Mereka kini dikenal sebagai *Haymarket Martyrs*. Peristiwa ini justru melahirkan solidaritas internasional, dan tanggal 1 Mei kemudian diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia.

Taktik semacam ini bukanlah insiden tunggal, ia muncul di atas landasan kelembagaan yang berubah. Dalam waktu beberapa bulan terakhir ada pergeseran kebijakan yang memperluas ruang pengaruh militer dan menambah otoritas aparat keamanan di ranah sipil, perubahan yang diprediksi akan membuka kembali pintu bagi praktik-praktik represif yang sempat distandarisasi masa lalu (Orde Baru). Ketika kerangka hukum dan institusional sudah terlampau miring, retorika "keamanan" dan "ketertiban" menjadi landasan yang mudah untuk menormalisasi penangkapan massal dan pembungkaman politik.

Gelombang represi berbalut legitimasi hukum atau moral yang ada di Indonesia dalam rentang waktu nyaris satu abad mengajarkan bagaimana cara-cara legal-institusional dipakai untuk menyingkirkan lawan politik: dari pembersihan (atau sebut saja, pembantaian) komunis di tahun 1965–66 yang meninggalkan luka kolektif hingga sekarang, juga praktik-praktik lebih halus yang membatasi ruang kebebasan sipil pasca-Orde Baru. Di sisi lain, pembunuhan dan impunitas terhadap pembela HAM memberi pelajaran pahit tentang bagaimana Negara bisa menutup-jejak sambil mempertahankan citra legalitas. Sekali lagi, narasi keamanan menyalurkan tindakan yang berakibat trauma politik panjang.

Apa implikasi dari pola-pola represi ini? *Pertama*, munculnya *chilling effect*—orang akan berpikir dua kali sebelum turun ke jalan, berbicara lantang dan terbuka secara langsung atau sekadar sambat di media sosial, atau membuka diskusi radikal yang sebenarnya perlu. *Kedua*, normalisasi represi memberi lampu hijau bagi praktek pengintaian, penyitaan materi intelektual, dan pelabelan ideologi

sebagai kriminal, mempersempit ruang naratif yang aman untuk kritik. *Ketiga*, represifitas yang terus-menerus justru memaksa sebagian elemen aktivis untuk bergerak ke ruang yang lebih tertutup untuk menavigasi artikulasi publik. Bukti-bukti soal implikasi semacam ini juga tercatat dalam laporan-laporan global yang memetakan penggunaan undang-undang keamanan untuk menekan aktivisme. Laporan IFEX (*International Freedom of Expression Exchange*), dari tahun 2014 hingga 2023, menyebutkan setidaknya ada 112 tindakan represi transnasional yang dilakukan terhadap jurnalis oleh 26 pemerintah di seluruh dunia. Taktiknya termasuk penyerangan siber/digital, pengusiran, penangkapan ilegal, intimidasi terhadap anggota keluarga, bahkan ancaman fisik atau pemantauan musiman terhadap mereka yang bekerja dari pengasingan. Amnesty International Indonesia juga menyebutkan bahwa sedikitnya ada 21 negara mengajukan (atau sedang) mendiskusikan undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara, berekspresi, dan kebebasan pers, termasuk Indonesia. Pola-pola pelanggaran serta praktik otoriter terasa semakin menguat, termasuk penggunaan regulasi digital atau undang-undang seperti UU ITE yang dipakai untuk mengkriminalisasi ujaran atau ekspresi kritik.

Apa yang terjadi di jalanan Bandung yang berujung pada penangkapan 42 orang di mataku bukanlah sekadar anomali, atau peristiwa yang terjadi di dalam vakum. Ia adalah sebuah gema dari pola yang lebih luas, di mana kebebasan sipil (di seluruh dunia) terus mengalami kemerosotan, dan negara-negara di berbagai benua semakin sering menggunakan label, undang-undang represif, atau hukum anti-teror untuk mengekang entah itu lawan politik dan gerakan sosial (Trump, contohnya, baru saja secara terang-terangan melabeli Antifa sebagai kelompok "teroris", sekaligus menyokong aksi pembungkaman yang dilakukan stasiun televisi ABC terhadap pembawa acara Jimmy Kimmel atas komentarnya terhadap peristiwa pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk, dan secara praktis melanggar Amandemen Pertama mereka yaitu kebebasan berekspresi). Penurunan kebebasan berpendapat dan pembungkaman protes di banyak negara memungkinkan taktik "tangan besi" seperti yang terjadi belakangan ini menjadi wajar.

*****

> *We aren't citizens. We will never adopt your point of view of the whole, your management point of view. We refuse to play the game, that is it.*
>
> *— Tiqqun, This Is Not a Program (hal. 61)*

Ada satu hal yang sering disalahpahami, bahkan oleh sebagian kawan-kawan yang turun ke jalan, bahwa aksi-aksi langsung adalah sesuatu yang harus dijauhkan atau disangkal demi menjaga "citra" gerakan agar tidak dibilang "anarkis/anarko". Ini mungkin adalah dampak dari *chilling effect* yang kubicarakan tadi, penyebaran ketakutan yang dilakukan secara sistematis, dari tahun ke tahun. Padahal, bukankah sejarah dan pengalaman mutakhir menunjukkan sebaliknya? Bahwa dengan mengakui aksi langsung sebagai bagian sah dari spektrum perlawanan, kita bisa menyingkap logika represi Negara sekaligus mempertahankan martabat gerakan itu sendiri? Negara selalu

membutuhkan dikotomi "damai vs kekerasan," "legal vs ilegal." Dengan menolak dan menyangkal aksi langsung (sebagai metode praksis yang etis), kita tanpa sadar bermain di atas medan yang mereka tentukan. Konsekuensinya, Negara bisa dengan mudah menuding: "Lihat, mereka sendiri menyangkal sesamanya, artinya mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah." Keraguraguan untuk mengakui aksi langsung sebagai metode etis kelompok maupun individu inilah yang membuat represi semakin mudah dilakukan.

Conspiracy of Fire Nuclei (CCF) yang muncul pada akhir 2000-an di Yunani, melakukan serangkaian aksi militan—dari bom surat hingga serangan simbolik ke target-target kapitalisme/korporasi dan Negara. Uni Eropa (termasuk Yunani), menyebut mereka kelompok teroris. Tapi yang menarik bagiku, CCF sejak awal tidak bersembunyi di balik anonimitas pasif. Mereka menulis manifesto, pamflet, dan komunike dari dalam penjara, mengakui bahwa kesemuanya adalah benar adanya tindakan mereka (persis seperti apa yang dilakukan oleh anonim dalam kasus pengeboman/pembakaran ATM tahun 2011, yang kudengar juga bentuk aksi solidaritas terhadap tahanan anarkis CCF). CCF menyatakan bahwa aksi-aksi yang mereka lakukan bukanlah produk kriminalitas, tapi ekspresi politik, bagian dari tradisi panjang anarkisme militan di Yunani yang memang punya basis sejarah kuat sejak 1970-an. CCF menolak untuk diposisikan sebagai anomali, atau "penyimpangan" dari gerakan. Mereka membangun narasi bahwa perlawanan punya banyak bentuk: okupasi, demonstrasi, sabotase, solidaritas, bahkan kekerasan simbolik terhadap institusi Negara dan kapital. Menolak mengakui aksi langsung artinya sama dengan mengkhianati prinsip dasar anarkisme itu sendiri, bahwa perlawanan harus otonom, plural, tak bisa ditentukan dari pusat, dan *tanpa negosiasi*; menolak tuduhan itu artinya sama dengan membiarkan Negara mendefinisikan siapa mereka (pelabelan).

Penangkapan Tarnac 9

Di sisi lain, sembilan orang di desa Tarnac ditangkap atas tuduhan aksi sabotase jaringan kereta cepat TGV di Prancis tahun 2008. Polisi Prancis mengaitkan aksi itu dengan teks-teks Tiqqun khususnya *The Coming Insurrection* (2007), dan menuduh mereka sebagai "jaringan teroris anarkis otonomis." Para terdakwa Tarnac (yang kini dikenal sebagai Tarnac 9) menyangkal keterlibatan mereka atas aksi sabotase/"terorisme" tersebut hingga tuduhan tersebut dicabut tahun 2018, dan mereka dibebaskan dari dakwaan utama yaitu terorisme. Tapi yang membedakan adalah, penyangkalan Tarnac 9 bukan didasari pada ketakutan, melainkan strategi politik. Mereka ingin memperlihatkan bahwa tuduhan

"terorisme" hanyalah fabrikasi aparat untuk menciptakan musuh imajiner di tengah masyarakat, dan bahwa gaya hidup komunal mereka—bertani, membuka toko koperasi, hidup sederhana di desa—telah dianggap cukup berbahaya oleh Negara. Dengan menyangkal, mereka membalikkan cermin ke wajah Negara: yang disorot bukan lagi "kejahatan" yang tak pernah terbukti, melainkan kecacatan logika Negara yang dengan panik membidik siapa saja yang berani berimajinasi untuk hidup di luar norma kapitalisme dan Negara.

Di Filipina, Anarchist Black Cross (jejaring abolisionis internasional) mengadopsi metode insureksionis serupa yang berakar dari subkultur punk, persis dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mereka melakukan aksi-aksi sabotase kecil secara terang-terangan, dari grafiti, blokade jalan, hingga perusakan simbol kapitalisme seperti papan iklan/billboard, dan tak menutup diri dari potensi konflik horisontal (melawan publik konservatif dan organisasi-organisasi Kiri). Forum-forum dan *eco-camp* seperti *Black & Green Forum & 2nd Solidarity Eco-Camp* di Filipina pun diadakan dan diorganisir oleh Local Autonomous Network (LAN) dan Mobile Anarchist School pada sekitar 2012–2013. Kegiatan ini melibatkan diskusi, pendidikan politik dalam kerangka non-hierarkis dan anti-otoritarian, serta berbagi pengalaman lokal mengenai perlawanan berupa aksi langsung atau perusakan terhadap simbol-simbol kapitalisme (korporasi) dan Negara.

Apa yang menurutku bisa dipelajari di sini bukan soal pengadopsian bentuk aksi, tetapi bagaimana kita harus memahami betul logika yang meliputinya. Aksi langsung, jika diputuskan dengan kesadaran, dengan pertimbangan konteks, risiko, dan solidaritas, adalah taktik yang sah. Ia harus diposisikan secara strategis, tidak asal-asalan (meskipun keasal-asalan adalah juga letupan kreatif, dan sewaktu-waktu bisa dipahami sebagai *jouissance*), tidak terjebak dalam logika spektakel yang justru mudah dimanfaatkan Negara. Dalam kerangka materil, mengakui aksi langsung berarti mengakui bahwa represi Negara tidak hanya bekerja di level fisik, tapi juga di level wacana. Negara (dan kroni-kroninya, termasuk *influencer*) ingin menentukan apa yang boleh disebut politik, dan apa yang harus disebut kriminal. Menyangkal aksi langsung adalah memberi mereka kemenangan dan kenyamanan (ini yang bagiku paling menyebalkan) di level wacana. Mengakuinya, sebaliknya, adalah membongkar permainan bahasa mereka, bahwa yang mereka sebut "kriminal" seringkali hanyalah bentuk lain dari politik radikal.

Aksi langsung tidak bisa dilepaskan dari strategi yang lebih luas, dari jaringan solidaritas yang membuatnya tidak berdiri sendiri. Ketika aksi langsung diputus dari basis sosialnya, Negara akan dengan mudah melabelinya sebagai "aksi kekerasan yang terisolir." Tapi ketika ia dikaitkan dengan narasi yang lebih universal—perlawanan buruh, mahasiswa, seniman, komunitas akar rumput, individu-individu bebas—ia menjadi bagian dari orkestrasi. Dan di titik itu, Negara akan sulit untuk mematikannya tanpa memperlihatkan kebrutalan telanjang (wajah aslinya).

*****

> *Disobedience, in the eyes of anyone who has read history, is man's original virtue.*
>
> *— Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism (1891)*

Apa yang diperlukan di sini menurutku, lagi-lagi, adalah bagaimana caranya memperluas cakrawala imajinasi soal apa yang disebut perlawanan sekaligus merawat keberanian untuk tetap berimajinasi. Lokakarya poster, pembacaan puisi, forum-forum diskusi, acara-acara musik berbasis kolektif, ekonomi berbasis koperasi, dapur bersama, hingga aksi-aksi kekerasan dan perusakan (militan) sekalipun, semua bisa menjadi bagian dari ekologi perjuangan, apapun itu maknanya (atau "manfaatnya") bagi masing-masing individu. Menjaga agar api imajinasi tetap menyala memang bukan pekerjaan mudah. Itu justru melelahkan. Terlebih bagi banyak individu-individu seperti diriku yang sudah terlalu lama (dibuat) terbiasa dengan rutinitas keseharian yang menumpulkan, yang bekerja hanya untuk sekadar bertahan hidup, yang bersilat-kompromi dengan otoritas sebagai *Stockholm syndrome*, dan yang menelan kebisingan spektakel seperti bagian wajar dari keseharian.

Aku tahu, bahwasanya ada ruang lain di luar jeruji rutinitas. Ruang yang tak bisa disentuh oleh Negara, yang tak bisa dikebiri oleh hukum, dan tak bisa dibeli dengan gaji bulanan. Imajinasi adalah senjata yang paling sederhana sekaligus paling sulit dilucuti, di mana satu-satunya janji bisa ditepati: tentang mimpi-mimpi lain, membayangkan hidup yang lebih dari sekadar bertahan. Sebab dunia yang lebih layak dihidupi tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari keberanian untuk membayangkannya terlebih dahulu.

The Soundcarriers - Boiling Point (official video)
Ghost Box

Watch on

0 Responses to "Hantu Anarko dan Politik Penyangkalan"

Leave a Comment

Leave a comment